

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan penting yang harus menjadi prioritas oleh pemerintah mengingat dengan pertumbuhan penduduk akan berimplikasi terhadap peningkatan volume timbulan sampah. Di Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan UU No. 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah dengan tujuan agar terdapat kepastian hukum mengenai tanggung jawab, wewenang pemerintah pusat maupun daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan peraturan bupati No. 51 Tahun 2017 tentang Sinergi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang. Pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Pemalang dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dari TPS dan TPA yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam mengelola sampah dengan cara ikut serta dalam kegiatan relawan peduli sampah, kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) peduli sampah, serta dapat secara sukarela mendaftarkan diri menjadi bank sampah dengan menyeter sampah yang telah dipilah.

Permasalahan lingkungan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan fenomena urbanisasi dan masalah kependudukan dalam kerangka konteks pembangunan (Suryadi & Linda, 2021). Kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan populasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aktivitas lainnya. Meskipun peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang memperburuk kerusakan lingkungan, namun kerusakan tersebut juga dipengaruhi oleh aktivitas lain yang merusak lingkungan. Dengan kata lain, hubungan antara pertumbuhan populasi dan kerusakan lingkungan bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait.

Ketika pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan sedangkan laju pertumbuhan ekonomi berjalan secara lambat, maka kemiskinan makin bertambah dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial lainnya. Dengan bertambahnya populasi penduduk maka memerlukan ketersediaan pangan dan papan yang luas. Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas penduduk dapat menghasilkan buangan dan sampah. Sampah dan limbah hasil buangan dari aktivitas penduduk harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Ketika pertumbuhan penduduk terus meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi bergerak secara lambat, dampaknya dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, dibutuhkan ketersediaan kebutuhan dasar yang mencukupi. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga berarti peningkatan aktivitas manusia, yang mana menghasilkan peningkatan timbulan sampah. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat harus dikelola secara efektif dan efisien untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan.

Masyarakat sebagai sumber sampah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah tidak dapat berjalan efektif jika hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, masyarakat harus ikut memiliki peran dalam pengelolaan sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas dari pengelolaan sampah (Jomehpour & Behzad, 2020). Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah didasari oleh realita bahwa setiap individu akan terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung jika sampah tidak dikelola dengan baik (Shukor et al., 2011).

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat perlu diketahui dan menjadi fokus beberapa penelitian. Masyarakat yang menerima sosialisasi mengenai program pengurangan sampah akan memiliki tingkat partisipasi yang berbeda dengan yang tidak menerima sosialisasi (Pickering et al., 2020). Selain itu

masyarakat yang memiliki informasi yang lebih baik dan tinggal di sekeliling orang yang berperilaku ramah lingkungan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Xiao et al., 2017). Kondisi sosial demografis masyarakat seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan status kepemilikan tempat tinggal turut memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah (PP & Wijaya, 2014).

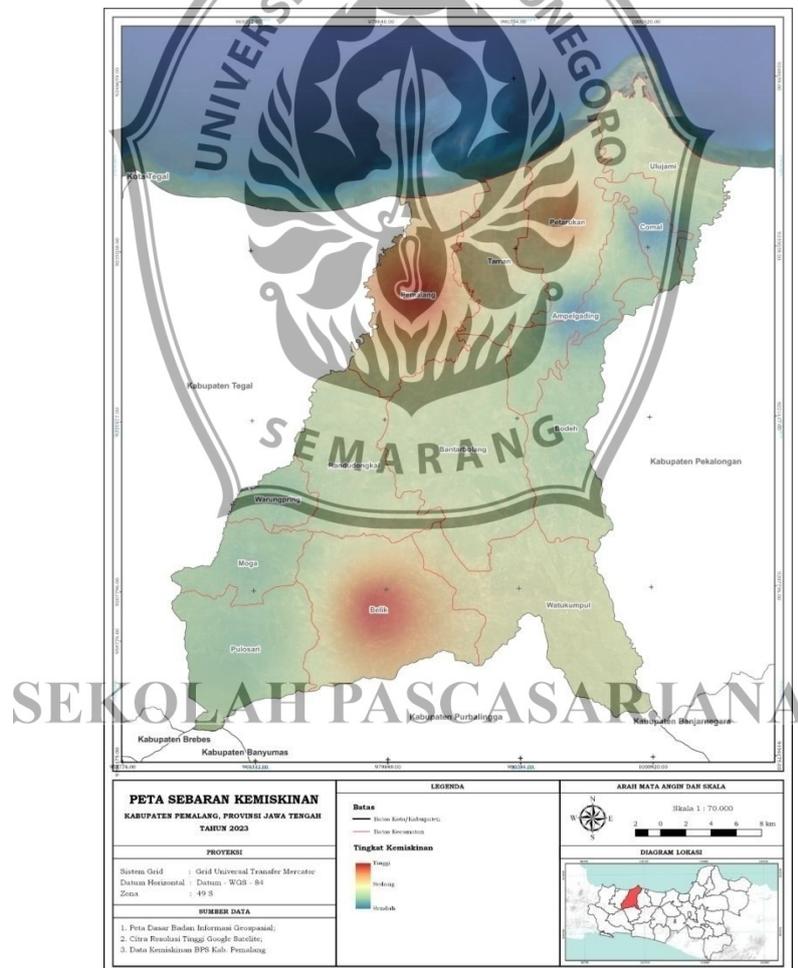
Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*). Dapat di katakan bahwa keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal.

Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Pemalang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera
1	Ampelgading	24.292	3.145
2	Bantarbolang	23.600	5.747
3	Belik	30.170	9.851
4	Bodeh	19.380	4.846
5	Comal	25.895	3.148
6	Moga	19.098	4.477
7	Pemalang	56.965	9.612
8	Petarukan	47.116	8.465
9	Pulosari	20.068	4.449
10	Randudongkal	32.443	5.730
11	Taman	53.197	6.911
12	Ulujami	33.387	6.324
13	Warungpring	13.549	4.581
14	Watukumpul	22.060	6.547

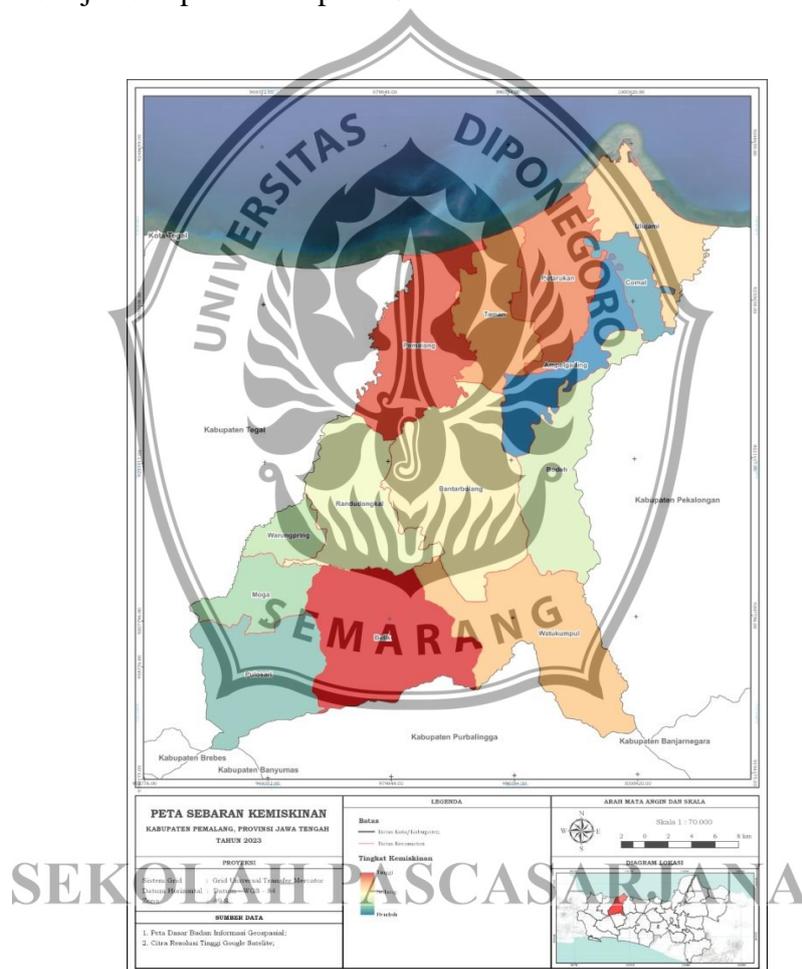
Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021

Tabel 1 menunjukkan jumlah kepala keluarga dan jumlah keluarga pra sejahtera Kabupaten Pemalang berdasarkan kecamatan pada tahun 2021. Jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Pemalang berada di Kecamatan Pemalang dengan jumlah penduduk 56.965 sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Warungpring. Untuk jumlah keluarga pra sejahtera paling banyak berada di Kecamatan Belik menempati urutan pertama dengan angka 9.851 KK, Kecamatan Pemalang berada pada urutan kedua dengan jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 9.612 KK, dan Kecamatan Petarukan berada pada urutan ketiga sejumlah 8.465 KK. Semakin banyak jumlah keluarga pra sejahtera maka dapat menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah tersebut juga tinggi.



Gambar 1 Sebaran Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Gambar 1 menunjukkan sebaran keluarga pra sejahtera di Kabupaten Pemalang pada tahun 2021. Warna merah berarti tingkat kemiskinan tinggi, warna kuning berarti tingkat kemiskinan sedang, dan warna biru berarti tingkat kemiskinan rendah. Dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi berada di Kecamatan Belik, Kecamatan Pemalang, dan Kecamatan Petarukan. Sedangkan tingkat kemiskinan yang rendah berada di Kecamatan Ampelgading dan Comal. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Sebaran keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Masyarakat kelompok pra sejahtera memiliki lebih banyak keterbatasan dalam pengelolaan sampah jika dibandingkan dengan masyarakat kelompok sejahtera mulai dari ilmu pengetahuan, akses informasi hingga sarana dan prasarana yang dimiliki. Masyarakat miskin di Gaza dalam praktik pembuangan sampah tidak melibatkan pemilahan sampah dan kepala keluarga tidak tertarik

untuk mendorong anggota keluarganya untuk memilah sampah (Salem, Mohammed; Raab, Katharina;Wagner, 2019).

Masyarakat kota dan desa memiliki perbedaan dalam mengelola sampah atau limbah hasil buangan. Pada umumnya kawasan pedesaan belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Karakteristik topografi yang meliputi perbukitan dan lembah serta jarak yang cukup jauh antara rumah di daerah pedesaan menyebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pelayanan dan penyediaan infrastruktur terkait sampah. Minimnya penyediaan fasilitas untuk pengelolaan sampah juga turut serta memperparah kondisi pengelolaan sampah di desa (Chen et al., 2019; Wang et al., 2017). Kesenjangan yang signifikan dapat dilihat antara pengelolaan sampah di desa dan kota (Boateng et al., 2016). Pengelolaan sampah di kota biasanya menggunakan manajemen 3P yaitu (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Penimbunan di TPA). Sedangkan pengelolaan sampah di desa sering kali dilakukan dengan cara membakar sampah, menimbunnya di halaman rumah, atau membuangnya secara sembarangan di beberapa lahan kosong (Chen et al., 2019; Nxumalo et al., 2020). Beberapa masyarakat desa juga memiliki kebiasaan untuk menggunakan sampah organik sebagai pakan ternak (de Morais Lima & Paulo, 2018).

Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara konvensional dapat menyebabkan permasalahan lingkungan serta mengancam kesehatan manusia. Seperti misalnya pembakaran limbah dengan skala kecil di pedesaan Cina menghasilkan emisi dioksin dan polutan mirip dioksin yang dapat terpapar ke manusia melalui pernafasan (Yang et al., 2019). Menurut de Morias Lima et al. (2021) pembakaran sampah dapat meningkatkan unsur toksik di udara, tanah, dan air sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem air tawar. Dengan adanya berbagai risiko tersebut menggambarkan bahwa dibutuhkan daur ulang dan sarana prasarana yang baik dan benar untuk mengelola sampah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting daur ulang sampah di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana perencanaan dan rumusan strategi pengembangan sarana dan prasarana daur ulang sampah bagi masyarakat pra sejahtera?

1.3. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi eksisting pengelolaan sampah dan daur ulang sampah di Kabupaten Pemalang.
2. Merumuskan strategi pengembangan sarana dan prasarana daur ulang sampah untuk masyarakat pra sejahtera.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan agar penelitian lebih terfokus dan memiliki batasan penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengertian sampah pada penelitian ini hanya dibatasi pada sampah padat yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga dan tidak termasuk sampah dari perindustrian, sampah rumah sakit maupun sampah berbahaya lainnya.
2. Melihat peranan masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk kelompok pra sejahtera.
3. Rumusan program pengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

1.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Lishan Xiao, Bo Fu, Tong Lin, Liang Meng, Ouwen Zhang, Lijie Gao (2023)	<i>Promoting and maintaining public participation in waste separation policies: A comparative study in Shanghai, China.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model geodetektor 2. Model dinamika sistem 3. Analisis skenario 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan masyarakat tentang pemilahan sampah pada tahun 2020 (setelah kebijakan lingkungan diterapkan) jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (sebelum kebijakan lingkungan diterapkan). 2. Tingkat kepuasan masyarakat meningkat 5,3% terutama di wilayah tenggara dan barat pinggiran Kota Shanghai 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menurun 5,4% di sebagian besar selatan Kota Shanghai 4. Implikasi kebijakan yang disarankan adalah dengan meningkatkan pengelolaan masyarakat, meningkatkan kekuatan pendorong intrinsik untuk perilaku ramah lingkungan, dan memberi contoh kepada masyarakat untuk memisahkan sampah daur ulang.
2	Norah Muisa Zikali,	<i>Household solid waste handling</i>	Analisis korelasi dan regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah limbah padat di Yeovil (masyarakat berpenghasilan

	Richman Munyaradzi Chingoto, Beaven Utete (2022)	<i>practices and recycling value for integrated solid waste management in a developing city in Zimbabwe</i>		menengah) relatif lebih tinggi dibandingkan di daerah Dangamvura (masyarakat berpenghasilan rendah) dan di daerah Hospital Hill (masyarakat berpenghasilan tinggi) 2. Tiga lokasi di pinggiran kota yaitu Dangamvura, Yeovil dan Hospital Hill produksi limbah padat terus berlanjut dan tidak ada upaya penggunaan kembali dan daur ulang yang sepadan 3. Terdapat potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dari penggunaan kembali dan daur ulang sampah untuk mengurangi kemiskinan di pinggiran kota
3	Lishan Xiao, Guoqin Zhang, Yan Zhu, dan Tao Lin (2017)	<i>Promoting public participation in household waste management: a survey based method and case study in Xiamen City, China</i>	Metode kuantitatif dengan model <i>Structural Equation Model (SEM)</i>	1. Peningkatan partisipasi masyarakat di Xiamen dapat dicapai dengan memberikan informasi yang lebih baik, meningkatkan fasilitas pengumpulan dan pembuangan sampah, iklan publik serta peraturan masyarakat 2. Masyarakat yang memiliki informasi yang lebih baik dan tinggal di sekeliling orang yang berperilaku ramah lingkungan memiliki

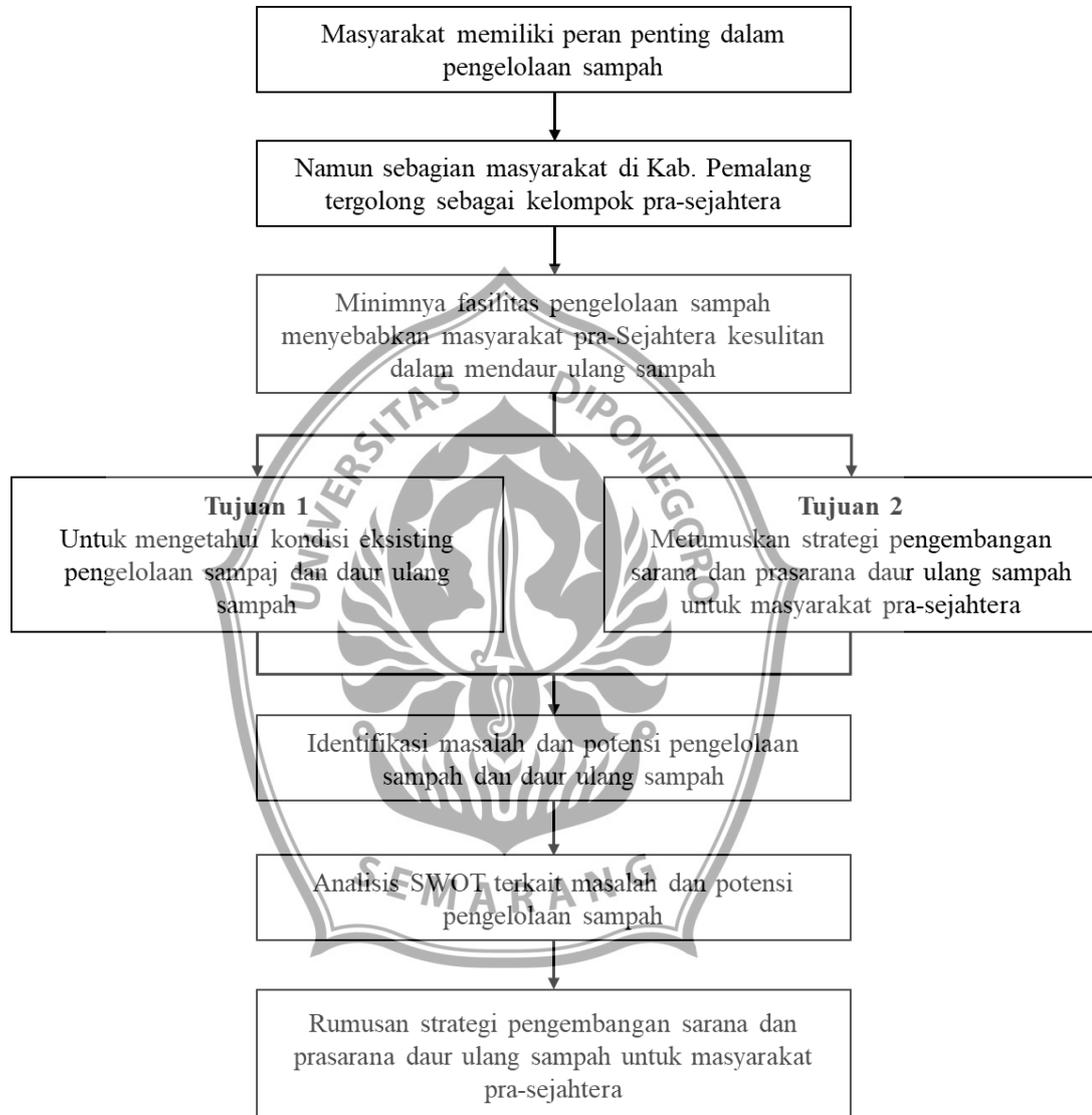
				<p>kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan</p> <p>3. Kebijakan sampah di kota-kota Cina dan pengelolaan sampah di masa depan harus berubah dari strategi yang hanya berpusat pada legislatif saat ini</p>
4	Walailak Atthirawong (2016)	<i>Factors affecting household participation in solid waste management segregation and recycling in Bangkok, Thailand</i>	Metode kuantitatif	<p>1. Masyarakat Bangkok memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap pemilahan sampah namun hanya 43% masyarakat yang melakukan pemilahan sampah</p> <p>2. Partisipasi masyarakat Bangkok dipengaruhi oleh kampanye dan program pelatihan tentang pengelolaan limbah padat dan usia masyarakat. Sehingga pemerintah harus memberikan kampanye dan seminar orientasi untuk pendidikan mengenai sampah dan kesadaran terhadap pengelolaan sampah</p>
5	Erlangga Ariesta PP dan Holi Bina Wijaya (2014)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daur ulang sampah di	Metode deskriptif dan kuantitatif <i>crosstab</i>	<p>1. Kegiatan pengelolaan daur ulang sampah di Kelurahan Tegalrejo dikelompokkan menjadi tiga kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap</p>

		<p>Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang</p>	<p>pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan</p> <p>2. Berdasarkan analisis tahapan partisipasi masyarakat menurut Wilcox, Kelurahan Tugurejo telah melakukan setiap tahapan partisipasi yaitu sampai tahap <i>supporting independent community interest</i>.</p> <p>3. Berdasarkan analisis crosstab terdapat hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, dan status kepemilikan tempat tinggal.</p>
--	--	--	--



SEKOLAH PASCASARJANA

1.6. Kerangka Berpikir



Gambar 3. Kerangka Berpikir